

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi, dan Kriminologis

Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi dibagi menjadi dua¹ yaitu, *Pertama*, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “*crime*” dan “*Logos*”. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu, sehingga Kriminologi mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. *Kedua*, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini, seringkali Kriminologi disamakan dengan “*Etiologi Kriminal*”.

Kebanyakan sarjana menganut pengertian kedua (sempit), dasar alasannya, jika menggunakan pengertian luas, muatan atau ruang lingkup kriminologi dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan ilmu lain, seperti : Penologi (ilmu tentang pembedaan pelaku kejahatan, Victimologi (ilmu tentang korban kejahatan), Psikologi kriminal (ilmu tentang kejahatan dari aspek kejiwaan), Statistik Kriminal (Ilmu tentang kejahatan dari aspek statistik atau data).

Sedangkan pengertian Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.² Kriminologis secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*field*

¹ I.S Soesanto, *Kriminologi*, Undip Semarang, 1996, halaman 7

² Ibid

research). Oleh karenanya dalam Kriminologi, meneliti kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan, yaitu :

1. *Pendekatan Deskriptif*, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya. Pendekatan Deskriptif ini dapat pula diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau sitomatologi.
2. *Pendekatan Kausal atau Etiologis*, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai etiologi kriminal.
3. *Pendekatan Normatif*, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta itu merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normatif ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.³

B. Kajian Teoritis mengenai Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat.

Kejahatan dalam bahasa inggris berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan. Dalam ilmu hukum pidana sering diistilahkan sebagai tindak pidana. Meski terkesan identik, namun dua istilah tersebut sesungguhnya berbeda. Kejahatan mengandung

³ Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Penerbit Alumni, halaman 71

pengertian sebagai tingkah laku atau perbuatan yang jahat, yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan perkosaan atau kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh manusia.⁴ Kejahatan diartikan pula sebagai perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan/patut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.⁵ Selain itu kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sehingga masyarakat menentangnya.⁶ Artinya disebut sebagai kejahatan pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus terkadang di dalam hukum, tetapi cukup perbuatan itu bertentangan dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat bersangkutan.⁷

Berbeda dengan tindak pidana, Sutherland berpendapat bahwa ciri pokok dari suatu tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya pemungkas.⁸ Prinsip pokok dari tindak pidana adalah perbuatan terlarang tersebut telah dirumuskan oleh negara dan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana.

Dari gambaran pengertian tersebut, secara rinci, R. Soesilo memberikan pengertian kejahatan, meliputi dua macam, *Pertama*, pengertian kejahatan secara yuridis, yaitu semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan pasal-pasal dalam KUHP atau Undang-undang lainnya. *Kedua*, pengertian kejahatan secara sosiologis, yaitu segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang

⁴ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bina Angkasa, Jakarta, 1985, halaman 122

⁵ Soedjono Dirjo Sisworo, *Bunga rampai Kriminologi*, Bina Angkasa, Jakarta, 1986, halaman 122

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, halaman 137

⁷ Ibid, halaman 19

⁸ Mulyana W Kusumah, *Kriminologi Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1984, halaman 9

secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁹

Sedangkan Simanjuntak secara lebih luas memberikan pengertian kejahatan ada tiga, yaitu:

- a. Pengertian secara *praktis*, yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang ada di masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi pencemoohan.
- b. Pengertian secara *religius*, yaitu pelanggaran atas norma Tuhan, kejahatan ini mengakibatkan dosa dan hukuman neraka.
- c. Pengertian secara *yuridis*, yaitu perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman).¹⁰

Jika diamati secara seksama, pengertian Simanjuntak di atas sesungguhnya sama dengan R.Soesilo, pengertian kejahatan secara praktis maupun religius tidak lain adalah merupakan pengertian kejahatan secara sosiologis menurut R.Soesilo, sedangkan kedua sarjana tersebut juga sama merumuskan kejahatan secara yuridis.

Berkenaan dengan pengertian kejahatan secara yuridis yang dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana, idealnya suatu perilaku tidak akan disebut tindak pidana kecuali memuat semua tujuh unsur tersebut (*memenuhi persyaratan*). Dengan cara yang sangat disederhanakan, berikut ini di kemukakan uraian singkat tentang tujuh unsur tersebut:

Pertama, sebelum suatu perilaku dapat disebut suatu tindak pidana haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. *Kedua*, Kerugian haruslah dilarang oleh Undang-undang, haruslah dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku yang anti sosial bukanlah kejahatan kecuali kalau hal itu dilarang oleh Undang-

⁹ R. Soesilo, *Kriminologi, Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 1995, Halaman

¹⁰ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Rajawali pers, Surabaya, 1982, halaman 64

undang. *Ketiga*, Haruslah ada “*perilaku*” sikap dan perbuatan yang “*disengaja*” atau “*sebrono*” yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. *Keempat*, adanya “*mens rea*” atau maksud jahat. *Kelima*, harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan satu hubungan kejadian diantara “*mens rea*” dengan “*conduct*”. *Keenam*, haruslah ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang oleh Undang-undang dengan “*misconduct*” yang voluntair (dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain). *Ketujuh*, harus ada hubungan yang ditetapkan oleh Undang-undang.¹¹

Menurut pendapat Kartini Kartono, *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya”.¹²⁾

Kejahatan menurut Richard Quinney adalah “suatu rumusan tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu suatu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”¹³

Sedangkan Kartono berpendapat bahwa Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang-undang pidana.¹⁴

Dan kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan dan sebagainya.

¹¹ Ninik Widiyanti, dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Angkasa, Jakarta, 1987, halaman 42-44

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1983, halaman 134.

¹³ Mulyana W Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1984, halaman 23

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, halaman 137

Hal ini akan nampak pula ada ungkapan di bawah: "... kejahatan yang selalu akan ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun."¹⁵

Dari ungkapan di atas maka jelaslah bahwa walaupun kejahatan merupakan suatu gangguan terhadap ketentraman, ketenangan dan keamanan masyarakat yang harus dihilangkan dari muka bumi ini, namun sesuai dengan sifat kodratnya sebagai kebalikan dari adanya kebaikan, maka kejahatan tersebut akan selalu ada dan akan tetap ada di muka bumi ini tidak dapat dimusnahkan sama sekali.

Selanjutnya mengenai pelanggaran, secara etimologis, berasal dari kata kerja : langgar yang berarti perbuatan menentang anjuran. Setelah diberi awalan pe- dan akhiran -an berarti sebuah tindakan yang bertentangan dengan tata hukum atau aturan yang disepakati.¹⁶

Sedangkan konsep menurut doktrin hukum pidana sesungguhnya pelanggaran itu adalah kejahatan atau tindak pidana. Hanya yang membedakan antara lain adalah¹⁷:

- a. Pelanggaran umumnya diatur dalam buku ketiga KUHP, meliputi antara lain pelanggaran ketertiban umum, kesopanan dan lain sebagainya. Sedangkan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, meliputi kejahatan pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya.
- b. Wujud perbuatan perbuatannya dilarang lebih bersifat bertentangan dengan norma-norma pengaturan ketertiban umum, sehingga dampak atau akibat dari pelanggaran tidak seberat kejahatan, seperti pelanggaran lalu lintas tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Berbeda dengan kejahatan yang wujud

halaman 1 ¹⁵ Soedjono D, SH, **Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983,

¹⁶ WJS Poerwadarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, halaman 369

¹⁷ R. Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politeia, Bogor, 1981, halaman 69

perbuatan dilarang selain bersifat pengaturan umum, juga karena berakibat merugikan orang, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.

- c. Sanksi pidana dari pelanggaran relatif ringan, dan umumnya berupa pidana kurungan atau denda, walaupun dijatuhkan sanksi pidana penjara umumnya tidak lebih dari 1 tahun penjara. Sedangkan kejahatan sanksi pidananya lebih berat, selain pidana penjara 20 tahun, bisa juga seumur hidup dan bahkan pidana mati.
- d. Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana, tetapi percobaan berbuat kejahatan tetap dijatuhi pidana.

C. Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*).

Menurut Momo Kelana bahwa : di Amerika Serikat dipakai istilah “*sherrif*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jadi dengan demikian didapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasa-nya, misalnya : “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Belanda. Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil proses Indonesianisasi dari istilah Belanda “*politie*”.¹⁸

¹⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK dan PT. Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 13

Istilah “polisi” semula berasal dari kata yunani “Politie” yang artinya seluruh pemerintahan negara kota. Dari situlah dapat dilihat atau disaksikan bahwa istilah “Polisi” dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan.

Menurut Momo Kelana bahwa: pengertian “Polisi” mempunyai banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya; di Inggris; “Polisi” (*Police*) adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di Jerman “Polisi” (*Polizei*) adalah badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum.¹⁹

Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).²⁰

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Momo Kelana bahwa: pengertian POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketenteraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.²¹

¹⁹ Ibid, halaman 17.

²⁰ E Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, halaman 733

²¹ Momo Kelana, Op.cit, halaman 33

2. Sejarah Singkat Kepolisian

Pada masa penjajahan Belanda, Polisi disebut Menteri Polisi yang berfungsi sebagai penjaga hutan dan perkebunan serta memberantas penyelundupan-penyelundupan candi serta pengangkatannya dilakukan oleh presiden.

Sedangkan pada saat itu yang berlaku adalah Staatsblaad 1 & 13 Nomor 125 (tentang wewenang dan polisi) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menghilangkan segala rintangan yang ada di jalan umum tanpa ijin dari yang berwenang.
- b. Menetapkan penerangan/ lampu bila rintangan itu pada waktu malam hari tidak diberi lampu (atas biaya yang mengadakan rintangan disitu)
- c. Menyita/menangkap hewan-hewan yang berkeliaran tanpa gembala yang memasuki halaman/ kebun/ tanah yang ditanami orang.
- d. Membubarkan keramaian umum tanpa ijin.
- e. Memberikan perintah/ paksaan perintah di jalan umum guna mencegah kecelakaan lalu lintas.

Pada masa pendudukan Jepang di tanah air kita, boleh dikatakan tidak ada peraturan-peraturan pokok mengenai kepolisian yang diciptakan. Kepolisian pada waktu itu pada umumnya hanya melanjutkan dan berpegang pada ketentuan yang sudah ada pada zaman Hindia Belanda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah militer Jepang. Hal ini dapat dimengerti oleh karena waktu yang begitu singkat (3 tahun). Ditambah lagi dengan suasana perjuangan dengan suasana perjuangan tidak memungkinkan untuk membuat peraturan baru. Selain itu ditinjau dari segi kepentingan pemerintahan militer Jepang adanya peraturan-peraturan pokok mengenai kepolisian nampaknya tidak begitu diperlukan. Secara umum dapat dilihat

bahwa pemerintah militer Jepang cenderung untuk melakukan tindakan diluar perundang-undangan.

Mengenai status kepolisian pada masa pendudukan Jepang juga tidak didapatkan peraturan-peraturan sebagai landasannya. Pada masa itu status kepolisian secara formil seolah-olah melanjutkan apa yang tercantum didalam staatsblaad 1813 nomor 373 juncto staatsblaad 1932 nomor 52 tentang pimpinan harian dan korp-korp polisi setempat di daerah-daerah gubernemen di Jawa dan Madura, dimana dapat diketahui bahwa polisi ada di bawah pamong praja.

Pembagian daerah kekuasaan kepolisian disesuaikan dengan pembagian daerah Militer Jepang dan setelah diadakan reorganisasi kepolisian (1944) untuk Jawa dan Madura, maka di tingkat pusat terdapat gunseikanbu-keisatsubu (Departemen Kepolisian dari pemerintah pusat balatentara Jepang) yang hanya merupakan pusat pimpinan administratif organisatoris dan pimpinan mengenai penguasaan dari polisi.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenangnya dikerahkan untuk membantu Jepang dalam peperangan. Dengan demikian, maka polisi turut langsung dalam usaha-usaha yang menyangkut pertahanan, misalnya penjagaan bahaya udara, mengukur jembatan-jembatan, turut membuat kubu-kubu dan lain sebagainya.

Dengan demikian banyak tugas-tugas yang dilaksanakan tanpa dasar perundang-undangan oleh karena petunjuk-petunjuk diterima dari komandan tentara setempat dan ditunjuk untuk usaha-usaha peperangan.

Di dalam zaman kemerdekaan, apa yang menjadi tujuan kepolisian adalah sejalan dengan tujuan negara dan masyarakatnya. Sedangkan tujuan negara terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tujuan kepolisian Republik Indonesia untuk ketertiban pribadi rakyat Indonesia seluruhnya. Tujuan negara dalam

suatu negara hukum pada akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Kepentingan pemerintah dengan rakyatnya menjadi satu dan diperjuangkan bersama, dengan demikian polisi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini berarti bahwa rakyat diberi hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk setiap saat mengontrol jalannya alat-alat perlengkapan negara termasuk polisi.

Sejak kemerdekaan, kepolisian di Indonesia mengalami perubahan status yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan tugas yang sangat pesat. Pentingnya penentuan status kepolisian ditunjukkan dengan keluarnya maklumat pemerintah 2 bulan sesudah proklamasi yaitu tanggal 1 Oktober 1945 dimana dinyatakan bahwa kedudukan polisi tetap berada dalam lingkungan departemen dalam negeri dan taktis dibawah perintah Jaksa Agung Pemerintah Daerah.

Pada tahun 1946 dikeluarkan penetapan pemerintah nomor 11/So/1946 tanggal 1 Juli 1946, sejak mana Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi jawatan tersendiri “Jawatan Kepolisian Negara” dibawah pimpinan Perdana Menteri. Penetapan Pemerintah tersebut merupakan peraturan yang mengadakan pembaharuan tentang status kepolisian Indonesia. Maka dari itu setiap tanggal 1 Juli setiap tahun diperingati sebagai hari Bhayangkara.

Antara tahun 1946 sampai tahun 1959 terjadi perubahan dan pembenahan mengenai status kepolisian sampai akhirnya dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi Negara Republik Indonesia. Perubahan konstitusi bagi status kepolisian mempunyai pengaruh yuridis oleh karena apa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar sementara 1950 tentang kekuasaan kepolisian ternyata tidak terdapat dalam Undang-undang 1945 yang berlaku kembali di Negara Republik Indonesia.

Menurut ketetapan MPRS No. 11/1960 Pasal 54 ayat C alinea terakhir yang mana menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara. Pernyataan tersebut kemudian dicantumkan pula di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian, dimana dinyatakan bahwa:

1. Departemen kepolisian menyelenggarakan tugas POLRI.
2. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.

Berdasarkan keputusan presiden Nomor 290 tahun 1964 kedudukan kepolisian sama dengan ketiga angkatan bersenjata (Darat, Laut dan Udara). Dari keputusan presiden tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan keputusan presiden Nomor 52 tahun 1969 dimana dinyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian organik dari departemen pertahanan keamanan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, maka status, fungsi dan peranan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur angkatan bersenjata Indonesia semakin jelas dan terperinci.

Hal tersebut bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 pasal 29 yang berbunyi :

Angkatan bersenjata terdiri atas:

- a. Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Darat beserta cadangannya.
- b. Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Laut beserta cadangannya.
- c. Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Udara beserta cadangannya.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, keputusan panglima angkatan bersenjata nomor Kep/II/P/III/1984 mengenai

kedudukan POLRI dinyatakan dalam pasal 1, yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI, adalah suatu bagian integral ABRI yang kedudukannya di bawah Pangab.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia telah dipisahkan dari bagian integral ABRI dan berdiri sendiri di bawah langsung komando Presiden dan tidak lagi kedudukannya di bawah Pangab seperti sebelum Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 diberlakukan.

3. Fungsi POLRI

Sesungguhnya telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Dalam Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa secara umum mengenai fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

a. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi :

- (1). Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.
- (2). Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas :

(a) Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.

(b) Fungsi Kepolisian administrative, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan tindakan-tindakan administratif.

b. Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.²²

Selanjutnya mengenai fungsi Kepolisian negara republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

4. Tugas Polri

Jika disimak bahwa sesungguhnya pola perumusan tugas kepolisian negara republik Indonesia, dengan lingkup tugas antara lain :

- a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun bidang represif.
- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/ badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas.

²²*Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian Republik Indonesia*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Desember 2002, halaman 40

- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan system Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundangan.²³

Selanjutnya secara yuridis mengenai tugas-tugas Polri ini, dapat dilihat dalam pasal 13 UU nomor 2 tahun 2002 bahwa :

“Tugas Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sedangkan operasionalisasinya terhadap pasal 13 tersebut dapat diperhatikan pasal berikutnya yaitu pasal 14 UU nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

²³Ibid, halaman 41

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.”

5. Wewenang Polri

Sebagai pimpinan eksekutif pemerintahan, presiden dalam menjalankan pemerintahan negara mendelegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan negara berupa kewenangan-kewenangan atau wewenang-wewenang. Salah satu kewenangan atau wewenang tersebut adalah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum.

Polri dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa :”Negara

Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)". Oleh karenanya menurut Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik Indonesia, lingkup wewenang Polri tersebut dibatasi oleh "lingkungan kuasa hukum" berdasarkan :

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (*zakengebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik.
- b. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*) yang terjangkau oleh ketentuan perundangan yang mengatur Hukum Acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.
- c. Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*) yakni lingkup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan Undang-undang tentang Kadaluarsa masalah tertentu.
- d. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*ruimtegebied*) yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik, serta hukum adat di suatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.²⁴

Sedangkan secara yuridis, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia mengatur tentang kewenangan Polri dalam pasal 16, berbunyi :

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

²⁴ Ibid, halaman 42

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikannya untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

D. Tinjauan Yuridis tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam tata hukum Indonesia, piranti hukum yang mengatur mengenai per-lalu lantasan adalah Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. UU ini dibuat dengan maksud bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di samping itu, untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.²⁵

²⁵ Konsiderans UU No.14/1992 tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan

Dalam UU No. 14/1992 tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan tersebut, dirumuskan beberapa pengertian istilah terutama yang terkait dengan judul tugas akhir ini seperti istilah lalu-lintas, angkutan, kendaraan umum dan terminal, sebagaimana diatur dalam Bab I mengenai Ketentuan umum.

Pasal 1 angka 1 : Lalu-lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan

Pasal 1 angka 2 : Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Pasal 1 angka 5 : Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Pasal 1 angka 9 : Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Dalam UU No. 14/1994 tersebut dirumuskan juga mengenai asas dan tujuan dari pengaturan per-lalu-lintasan sebagai berikut :

Pasal 2 : Transportasi jalan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3 : Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu-lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan larangan parkir dan stop (obyek sorot/ tema dalam tugas akhir ini), secara tersirat diatur dalam UU No.14/1992, yaitu khususnya berkenaan dengan tujuan akhir dilakukan pengaturan tersebut.

Pasal 8 ayat (1) : Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:

- a. rambu-rambu;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat;
- d. alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
- e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- f. fasilitas pendukung kegiatan lalu-lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Salah satu rambu-rambu itu adalah larangan parkir dan larangan stop (berhenti) di area jalan tertentu. Larangan itu dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan. Bahkan UU No.14/1994 dengan tegas menentukan tujuan dari adanya penataan dari fasilitas parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) huruf c, sebagai berikut.

Pasal 11 ayat (1) : Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.

Pasal 22 ayat (1) huruf c : Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai : berhenti dan parkir

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma-norma dasar itu sesungguhnya semata-mata untuk mewujudkan asas manfaat, usaha bersama dan

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri, yang pada akhirnya tercipta keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan.

Untuk merealisasi asas dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, UU No.14/1992 merumuskan beberapa ketentuan pasal suruhan (kewajiban) dan larangan sekaligus sanksi bagi pelanggarnya, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut ini.

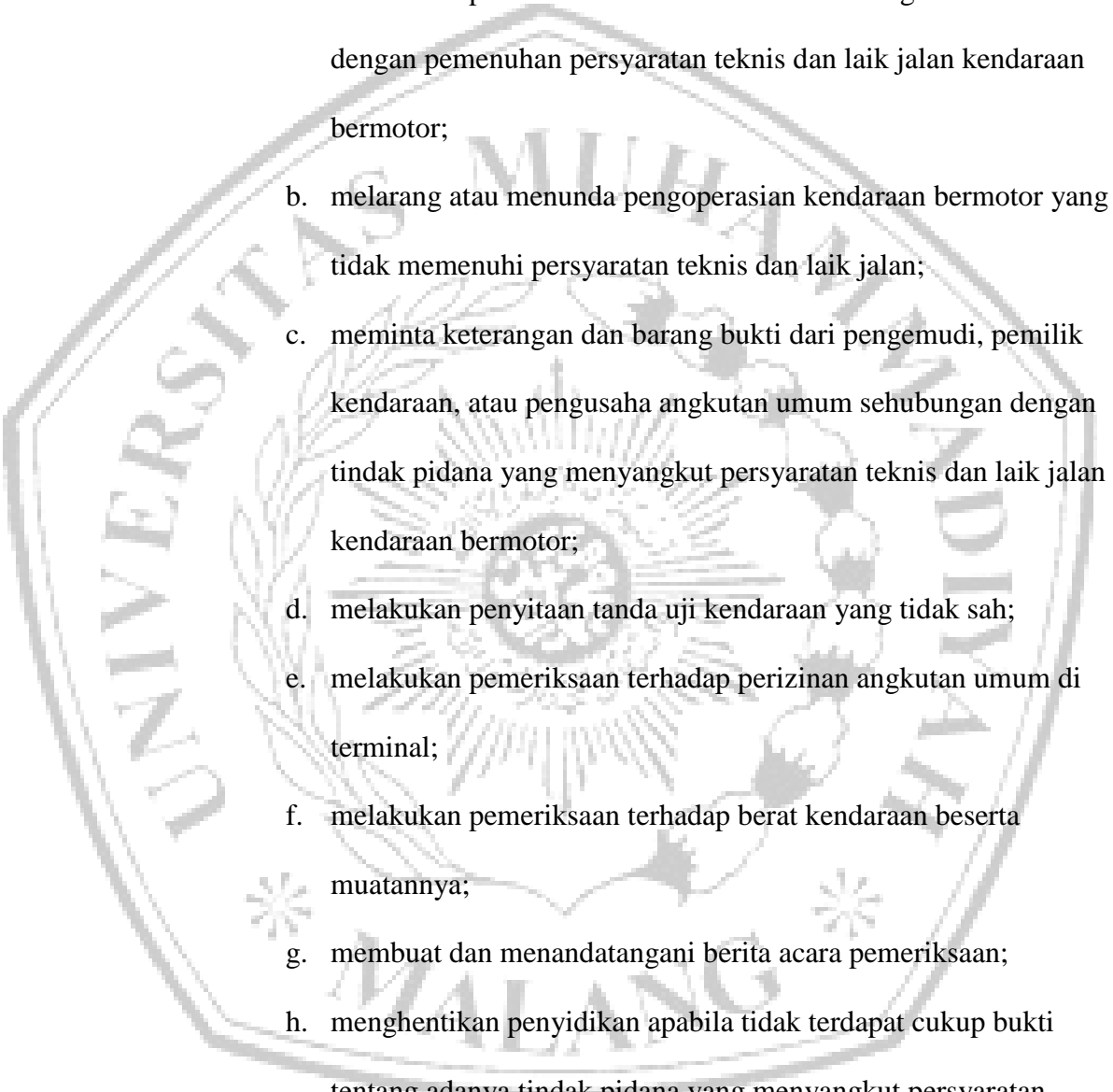
Pasal 23 ayat (1) huruf d : Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu-lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu-lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Untuk menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam konteks ini dibutuhkan organ penegak hukum sebagai penyidik. Dalam UU No.14/1992 kewenangan melakukan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal berikut.

Pasal 53 ayat (1) : Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan.

Pasal 53 ayat (2) : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk

- 
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

Sebagai ancaman dan alat pemaksa, dalam UU No.14/1992 diatur mengenai sanksi dan ketentuan pidana atas perbuatan pelanggaran dari kewajiban maupun larangan

(terutama terkait dengan pelanggaran rambu larangan parkir dan stop (berhenti) diatur dalam pasal pasal 61 ayat (1) UU No.14/1992, dan ketentuan residive (pengulangan perbuatan) dalam Pasal 69 UU No.14/1992 .

Pasal 61 ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu-lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu-lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 69 : Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran kedua ditambah sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

E. Teori Causa / Penyebab Kejahatan

Menurut ajaran kausalitet adanya suatu akibat pasti ada hal yang menyebabkannya. Sebab itu tidak hanya satu tetapi merupakan rangkaian dari sebab-sebab yang menimbulkan suatu akibat.

Di dalam kriminologi dikenal dengan apa yang disebut Etiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana akan kita jumpai bermacam-macam faktor, suatu faktor tertentu belum pasti merupakan sebab dari suatu tindak pidana.

Hal ini dikatakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana dapat dikatakan sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. Menurut *Multiple Factors Theory* :

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam, dan faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu skema tertentu. Atau lain perkataan untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.”²⁶

Perilaku jahat manusia menurut Kohlberg ditentukan oleh setidaknya dua faktor yaitu :

- a. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yg datang dari luar;
- b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.²⁷

Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik yaitu:

- a. Pemilihan pekerjaan ditentukan oleh bakat maupun lingkungan;
- b. Norma-norma jabatan, terutama di dalam pekerjaan yang terus menerus menimbulkan kontak;
- c. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.²⁸

²⁶ Edwind H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Alumni, Bandung, 1973

²⁷Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, halaman 378

²⁸Ibid, halaman 54

Mazhab Sosialis, memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi.²⁹ Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi, seperti miskin, pengangguran atau baru di-PHK.

Sedangkan Durkheim dalam bukunya *The Division of Labor in Society* 1893, menggunakan istilah Anomi untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat, yaitu sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan ini menimbulkan deviasi / penyimpangan.³⁰

Becker, berbeda lagi pandangannya, menurutnya kejahatan terjadi karena proses labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat memberi cap yang jelek, sehingga mengganggu jiwanya, yang kemudian frustrasi sehingga dilakukannya suatu kejahatan.³¹

Sedangkan Aristoteles (384. 322 S.M) berpendapat bahwa : “adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan”.³²

Hal ini sebenarnya sering dikemukakan oleh para sarjana dalam mencari sebab-sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah inilah yang dianggap paling penting diantara faktor-faktor lain.

Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat kita rasakan. Plato dan Aristoteles berpendapat: "Kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan ".³³

²⁹Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, 1996, halaman 15

³⁰Ibid, halaman 31

³¹Ramli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, halaman 39

³² Kartini Kartono, Loc Cit, halaman 161

³³ Soedjono D. SH, Op Cit., halaman 27

Perbedaan antara miskin dan kaya merupakan gejala ekonomi, demikian pula perbedaan antara pengusaha, pekerjaan, buruh, penganggur merupakan gejala ekonomi pula.

Perbedaan-perbedaan itulah yang kadang-kadang sangat menyolok menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, pertentangan- pertentangan sehingga akan menimbulkan kejahatan.

Hal-hal yang sangat mudah sekali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat yang berakibat langsung atau tidak langsung timbulnya kejahatan antara lain: urbanisasi, pengangguran, gelandangan (tuna wisma, tuna karya dan sebagainya).

Faktor penyebab lainnya adalah adanya dorongan biologis yang besar membuat seseorang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto, bahwa :

“Kriminalitas orang-orang berusia lanjut agaknya timbul dari ketidak sesuain atau ketidak seimbangan antara hasrat nafsu keinginan (libido) dan kemungkinan pemuasan atau potentie.”³⁴

Kenyataan yang tak dapat disangkal lagi bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa seseorang baik sebagai individu maupun sebagai mahluk masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ini tokoh penting dari mashab Perancis atau mashab lingkungan G. Trade mengatakan bahwa : “Kejahatan bukan suatu gejala yang antropolois tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.”³⁵

Pendapat di atas, juga dipertegas oleh para ahli kriminologi dan sosiologi yang berpendapat bahwa : “Kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat

³⁴ Sudarto (II), *Kapita Selektu Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, halaman 154

³⁵ W. A. Bonger, Op. Cit, halaman 97

persemayaman bagi kejahatan (*Evil Resides in an imperfect environment*)”.³⁶

Jadi setiap manusia dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya selalu mengikuti keadaan lingkungan dimana ia hidup. Atau dengan perkataan lain, keadaan lingkungan dimana seseorang biasanya hidup, berpengaruh besar terhadap tingkah laku dan perbuatan orang tersebut.

Faktor lingkungan itu sendiri beragam jenisnya, oleh karenanya yang menjadi titik sorot, dalam tulisan ini adalah faktor lingkungan yang berasal dari media komunikasi di sekitar kita, seperti bacaan harian dan film. Faktor lingkungan inilah yang peka terhadap remaja. Bacaan buruk dan picisan mempunyai pengaruh yang berbahaya dan menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal yang sehat di waktu senggang. Harian-harian yang penuh sensasi dan membuat gambar-gambar erotis dan pornografi akan memberikan khayalan-khayalan bagi pembaca. Di samping bacaan picisan dan harian sensasi film yang menyajikan cerita-cerita negatif juga mempunyai pengaruh yang berbahaya. Lebih-lebih dengan beredarnya secara gelap kaset-kaset video porno .

Mengapa tidak semua orang yang menikmati bentuk-bentuk hiburan tersebut akan melakukan semua kejahatan seksual, tetapi sarana-sarana tersebut bisa merupakan faktor pengaruh yang kuat terhadap timbulnya tindak pidana. Menurut pendapat penulis, bagaimanapun besarnya pengaruh kuasa peniruan ada pada diri seseorang, tetapi apabila ia mempunyai mental yang kokoh dan iman agama yang kuat maka segala tingkah laku dan perbuatannya pasti tidak akan menjurus, selain itu tidak terlepas dari pada lingkungan pendidikan keluarga yang baik sebagai dasar dari pembentukan mental dan kepribadian seseorang.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana adalah kesempatan. Kesempatan merupakan susunan keadaan disekitar

³⁶ Noach dkk, *Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984, halaman 2.

waktu tindak pidana dilakukan. Faktor ini harus dipandang sebagai penyebab sesungguhnya dan yang pokok adanya tindak pidana. Bonger dalam buku “Pengantar Tentang Kriminologi” mengatakan bahwa : “Sebagian besar dari kejahatan seksual adalah kejahatan “karena kesempatan (jalan yang sunyi dan lain-lain).”³⁷

Mengenai hal ini, beberapa ahli sosiologi (sosiolog) berpendapat sama mengenai penyebab kejahatan karena adanya kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut pandang sosiologis yaitu : “Bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.”³⁸

Selanjutnya dikemukakan pula teori yang terakhir yaitu teori *Fisiognomi* atau Lombroso (*Italian School*, 1876) yang juga sering disebut teori Antropologi Kriminal. Adalah seorang Lombroso yang dilahirkan dari keluarga Yahudi di Venesia, yaitu seorang dokter Ilmu Kedokteran kehakiman (IKK), melakukan penelitian terhadap tengkorak manusia, penelitian tersebut dilandasi oleh pandangan ahli hukum sebelumnya yaitu Aristoteles yang mengemukakan bahwa tengkorak manusia adalah tempat otak, sedangkan otak adalah sumber kecakapan, oleh karenanya otak berpengaruh terhadap kecakapan / akal, sehingga menggerakkan perilaku termasuk niat jahat. Dari pemikiran tersebut maka Lombroso melakukan penelitian terhadap bentuk fisik kepala manusia para narapidana di berbagai penjara, yang memperoleh kesimpulan antara lain :

“Bahwa penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat, Bakat jahat karena keturunan (*Born criminal*), bakat tersebut bisa dilihat dari ciri fisik, yaitu : tengkorak besar,

³⁷ Ibid, halaman 98

³⁸ Edwin H. Sutherland, *Azas-azas Kriminologi*, diperbanyak oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (tanpa tahun) halaman 3.

rahang bawah panjang, hidung pesek, asimetris, dahi ke belakang, rambut tebal, makin tua cepat botak kepala tengah, rambut janggut jarang, tahan sakit, alis tebal dan bertemu, rambut tumbuh hampir seluruh tubuh. Jika kurang dari 3 ciri tersebut bisa dipastikan bukan penjahat, sedangkan jika memiliki 3-5 ciri maka orang tersebut dalam kategori memungkinkan, sedangkan jika memiliki minimal 5 ciri bisa dipastikan orang tersebut adalah jahat.”³⁹

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Prof Dr W.M.E Noach, bahwa “kejahatan sesungguhnya tidak dapat dihilangkan dalam masyarakat, yang mungkin adalah hanya mengurangi atau membatasi adanya kejahatan tersebut.”⁴⁰

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Barnes & Teeters, bahwa “Kejahatan akan selalu ada, seperti adanya penyakit dan kematian pada manusia yang selalu pasti terjadi serta berulang-ulang adanya seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun”.⁴¹

Dalam ilmu Kriminologi, secara garis besar dikenal ada 2 cara penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Moralistik adalah penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/ akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.
2. Abolisionistik adalah penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan factor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.⁴²

³⁹ R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politea, Bogor, 1985, halaman 59

⁴⁰ Noach, Op. Cit halaman 6

⁴¹ Ibid

⁴² Sutherland, Op.Cit, halaman 96

Sedangkan Purniati berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional meliputi :

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya
2. Pemantapan hukum dan perundangan
3. Pemantapan sistem peradilan
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti Penasehat hukum, JPU, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.⁴³

Lebih jauh Purniati berpendapat, bahwa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sesungguhnya lebih baik dari pada penegakan setelah terjadi kejahatan dengan alasan bahwa :

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi
2. Tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban
3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat⁴⁴

Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, IS Soedarto berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara :
 - a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, jalan, dll
 - b. Penjagaan atau patroli

⁴³ Sutherland, Op.Cit, halaman 97

⁴⁴ Ibid

- c. Perbaiki struktur sosial dan ekonomi
 - d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial
 - e. Perbaiki peraturan yang kurang sempurna
2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa :
- a. Penyuluhan/pendidikan/Pembinaan moral
 - b. Penimbulkan kesan adanya suatu pengawasan⁴⁵

Sedangkan Reckless, mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut :

- 1. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana
- 2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan menjangkau ke depan
- 3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana
- 4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi kejahatan

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan

⁴⁵ Purniati, Op. Cit, halaman 63